

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Alasan Pemilihan Judul

Terdapat dua alasan penulis melakukan penelitian dengan memilih judul “Perbandingan Politik Luar Negeri Rusia Pada Masa Pemerintahan Mikhail Gorbachev dan Boris Yeltsin”. Pertama, pada saat Uni Soviet dipimpin oleh Mikhail Gorbachev terdapat penghapusan kontrol pemerintah pusat terhadap keputusan-keputusan produksi yang pada akhirnya menyebabkan kemacetan produksi. Selain itu, Gorbachev juga berusaha menghindari kerjasama dengan negara besar lainnya seperti Amerika.

Kedua, meskipun Rusia dapat dikatakan sebagai negara “pengganti” Uni Soviet, namun Boris Yeltsin sebagai pemimpin Rusia memiliki kebijakan luar negeri yang berbeda dengan Gorbachev. Yeltsin berusaha untuk mewujudkan “Revolusi Baru Rusia”, dan berusaha membawa Rusia pada era baru yang berbeda dengan era sebelumnya. Yeltsin juga berusaha memperluas pengaruhnya pada negara-negara bekas Uni Soviet dan terbuka untuk bekerja sama dengan negara lain demi kemajuan ekonomi Rusia.<sup>1</sup>

Rusia dibawah kepemimpinan Yeltsin berusaha menjalin kedekatan dengan negara-negara barat misalnya dengan bergabungnya Rusia pada *World Trade Organization* atau WTO yang diketahui didominasi oleh negara-negara barat. Hal tersebut tidak pernah dilakukan sebelumnya oleh Gorbachev, karena

---

<sup>1</sup> Varma, *Teori Politik Modern*, Raja Grafindo, Jakarta, 2001

Gorbachev kurang *interest* untuk menjalin hubungan dengan negara-negara barat yang pada akhirnya menyebabkan "permusuhan" antara Uni Soviet dengan negara barat utamanya Amerika.

Ketegangan antara Rusia dan Amerika (NATO) seputar rencana Amerika untuk memasang pertahanan rudal di beberapa negara satelit Uni Soviet hingga seputar masalah penyerangan Rusia atas Georgia, merupakan pertanda awal akan munculnya kekuatan negara adidaya baru pasca runtuhnya Uni Soviet (Rusia). Mungkinkan hal ini akan memunculkan babak baru perang dingin antara Amerika dan Rusia ditengah semakin pesatnya pertumbuhan ekonomi dan militer Rusia.

Amerika Serikat adalah satu-satunya negara adikuasa yang ada di dunia setelah runtuhnya Uni Soviet. Amerika dengan sejarahnya yang begitu panjang, memiliki hereditas tersendiri bagi kehidupan politik dunia, ditambah dengan dominasi dan hegemoninya terbukti dapat memaksimalkan daya tawarnya yang begitu tinggi dalam mengatur kebijakan-kebijakan luar negerinya bagi negara lain demi kepentingannya, bahkan Amerika tidak segan-segan untuk menerapkan standar ganda demi memenuhi kepentingan nasionalnya.<sup>2</sup>

### B. Latar Belakang Masalah

Federasi Rusia adalah sebuah negara yang membentang dengan luas di sebelah timur Eropa dan utara Asia. Dengan wilayah seluas 17.075.200 km<sup>2</sup>, Rusia adalah negara terbesar di dunia. Wilayahnya kurang lebih dua kali wilayah Republik Rakyat Cina (Tiongkok; RRT), Kanada atau Amerika Serikat.

<sup>2</sup> Amerika Vs Rusia : Masuki Babak Baru Perang Dingin, dalam <http://www.diploasi.com/2009/09/>

Penduduknya menduduki peringkat ketujuh terbanyak di dunia setelah Tiongkok, India, Amerika Serikat, Indonesia, Brasil, dan Pakistan.<sup>3</sup>

Negara ini dahulu pernah menjadi negara bagian terbesar Uni Soviet. Rusia adalah "ahli waris utama Uni Soviet" karena negara ini mewarisi 50% jumlah penduduk, 2/3 luas wilayah, dan kurang lebih 50% aset-aset ekonomi dan persenjataannya. Saat ini Rusia berusaha keras untuk meraih status sebagai negara adidaya lagi. Meskipun Rusia adalah negara penting, tetapi statusnya masih jauh dibandingkan dengan status Uni Soviet dulu.

Setelah kematian Konstantin Chernenko yang lanjut usia, Mikhail Gorbachev diangkat sebagai Sekretaris Jenderal Uni Soviet pada Maret 1985, menandai bangkitnya generasi kepemimpinan yang baru. Di bawah Gorbachev, yang relatif masih muda, para teknokrat yang berorientasi pembaruan, yang telah memulai kariernya pada puncak "de-Stalinisasi" di bawah Nikita Khrushchev (1953-1964), dengan segera mengonsolidasikan kekuasaan dalam PKUS, memberikan momentum baru untuk liberalisasi politik dan ekonomi, dan dorongan untuk mengembangkan hubungan-hubungan yang lebih hangat dan perdagangan dengan Barat.<sup>4</sup>

Pada saat Gorbachev memperkenalkan proses yang akan menyebabkan runtuhnya ekonomi komando administrative Soviet melalui program-programnya: *glasnost* (keterbukaan politik), *perestroika* (restrukturisasi ekonomi), dan *uskoreniye* (percepatan pembangunan ekonomi), ekonomi Soviet menderita karena inflasi tersembunyi dan kekurangan pasokan yang terjadi di mana-mana

<sup>3</sup> Wikipedia, "Rusia," <http://id.wikipedia.org/wiki/Rusia>, diakses tanggal 7 Agustus 2008.

<sup>4</sup> Wikipedia, "Rusia,"

yang diperparah oleh semakin meningkatnya pasar gelap yang terbuka yang menggerogoti ekonomi resmi. Selain itu, biaya status sebagai negara adikuasa atau militer, badan keamanan, subsidi bagi negara-negara klien sudah sangat berlebih-lebihan, melampaui ekonomi Soviet. Gelombang baru industrialisasi yang didasarkan pada teknologi informasi telah membuat Uni Soviet kesulitan mencari teknologi barat dan kredit untuk mengatasi keterbelakangannya yang semakin parah.

Undang-undang Koperasi yang diberlakukan pada Mei 1988 barangkali adalah yang paling radikal di antara semua langkah pembaruan ekonomi pada masa tahap awal era Gorbachev. Untuk pertama kalinya sejak Kebijakan Ekonomi Baru Vladimir Lenin,<sup>5</sup> undang-undang memungkinkan pemilikan pribadi bisnis dalam sektor-sektor jasa, manufaktur, dan perdagangan luar negeri. Di bawah aturan ini, restoran-restoran koperasi, toko-toko dan para pengusaha manufaktur menjadi bagian dari wajah Soviet.

Glasnost memberikan kebebasan berbicara yang lebih besar. Pers menjadi jauh lebih merdeka, dan ribuan tahanan politik dan banyak pembangkang di bebaskan. Sementara tujuan utama Gorbachev dalam mengadakan glasnost adalah untuk menekan kaum konservatif yang menentang kebijakan-kebijakan restrukturisasi ekonominya, ia pun berharap melalui berbagai keterbukaan, debat dan partisipasi, rakyat Soviet akan mendukung inisiatif-inisiatif pembaruannya.

---

<sup>5</sup> Kebijakan Ekonomi Baru adalah kebijakan ekonomi yang diusulkan oleh Vladimir Lenin untuk mencegah keruntuhan ekonomi Rusia. Kebijakan Ekonomi Baru memperbolehkan bisnis kecil dibuka kembali untuk keuntungan pribadi sementara negara tetap menguasai bank perdagangan

Pada Januari 1987, Gorbachev menyerukan diadakannya demokratisasi: memperkenalkan unsur-unsur demokratis seperti misalnya pemilu dengan banyak kandidat di dalam proses politik Soviet. Pada Juni 1988, dalam Konferensi Partai ke-19 dari PKUS, Gorbachev meluncurkan pembaruan-pembaruan radikal yang dimaksudkan untuk mengurangi kontrol partai terhadap aparat-aparat pemerintahan. Pada Desember 1988, Dewan Soviet Tertinggi Soviet menyetujui dibentuknya suatu Kongres Deputi Rakyat yang sebelumnya telah ditetapkan oleh amandemen konstitusi sebagai dewan legislative Uni Soviet yang baru. Pemilihan umum untuk anggota kongres diadakan di seluruh Uni Soviet pada Maret dan April 1989. Pada 15 Maret 1990 Gorbachev terpilih sebagai Presiden eksekutif pertama Uni Soviet.

Boris Nikolayevich Yeltsin tampil pertama untuk posisi Presiden Federasi Rusia, menjabat pada 1991-1999. Yeltsin lahir di Sverdlovsk (sekarang Yekaterinburg), Republik Soviet Rusia, Uni Soviet dan presiden Rusia semasa pasca Uni Soviet.<sup>6</sup> Boris Yeltsin pemimpin Rusia, setelah runtuhnya Uni Soviet, memiliki ambisi untuk mewujudkan “Revolusi Baru Rusia”, dan berusaha membawa Rusia pada era baru yang berbeda dengan era sebelumnya. Pada 1992, Yeltsin membawa Rusia memasuki “Sistem Ekonomi Pasar”, sebuah istilah yang digunakan untuk menghindari besarnya pengaruh kapitalisme AS di Rusia.<sup>7</sup> Yeltsin tidak menggunakan kata kapitalisme karena akan semakin memperjelas kekalahan Rusia kepada AS dan sekutunya.

---

<sup>6</sup> Wikipedia, “Boris Yeltsin,” [http://id.wikipedia.org/wiki/Boris\\_Yeltsin](http://id.wikipedia.org/wiki/Boris_Yeltsin), diakses tanggal 7 September 2008.

<sup>7</sup> *Journal of Democracy*, 1992, 13(4), 3-12.

Sistem ekonomi pasar ternyata membawa Rusia kepada masalah ekonomi. Tahun 1998, Rusia terpaksa meminjam uang kepada IMF, yaitu sebuah badan yang merupakan simbol penting bagi perekonomian barat.<sup>8</sup> Yeltsin dan para staf ahli ekonominya meneruskan sistem ekonomi pasar di Rusia yang memiliki dasar penswastaan, yaitu menjual aset negara dengan harga murah. Di tahun 1995, sekitar 65 persen aset negara telah beralih dari milik negara kepada individu atau swasta di Rusia.<sup>9</sup> Hal inilah yang akhirnya melahirkan satu kelompok kapitalis baru yaitu kelompok oligarki.

Kelompok oligarki Rusia adalah para hartawan yang memiliki keturunan Yahudi, dan mendapatkan kekayaan setelah runtuhnya komunisme Rusia. Kelompok oligarki Rusia berhasil membeli aset negara dengan harga yang sangat murah, sedangkan aset tersebut menghasilkan keuntungan yang sangat besar. Oligarki (*oligarchy*) biasanya diartikan sebagai suatu sistem pemerintahan negara yang pada dasarnya dikuasai oleh sekelompok kecil elit penguasa saja. Dalam konteks Rusia, istilah oligarki menunjuk para hartawan yang memperoleh kekayaan setelah runtuhnya komunisme di Rusia.<sup>10</sup> Kekayaan mereka berasal dari aset-aset negara yang dibeli dengan harga murah pada masa Yeltsin berkuasa, selanjutnya aset-aset tersebut menjadi hak milik pribadi. Kelompok entrepreneur atau sering juga disebut sebagai oligarki (Rusia), Cukong (Cina), Tycoon (AS) merupakan sekelompok pebisnis yang memiliki karakteristik mampu bergerak

---

<sup>8</sup> Margreet Strijbosch, "Perang Semu Rusia Melawan Oligarki", dalam [http://www.ranesi.nl/arsipaktua/rusia/rusia\\_oligarki080228](http://www.ranesi.nl/arsipaktua/rusia/rusia_oligarki080228), diakses tanggal 4 Januari 2008.

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> Nasrul Azwar, "Parpol, Oligarki, Dan Plutokrasi", dalam

cepat, tidak sabar, eksplosif, ambisius, berani menanggung resiko dan kerugian, serta suka akan kekuasaan.<sup>11</sup>

Saat era pemerintahan Gorbachev, kelompok oligarki mendanai instrument politik agar bisnis yang dijalankan oleh para kelompok oligarki memperoleh dukungan sehingga semakin besar dan otomatis menghasilkan keuntungan secara cepat dibandingkan melalui jalur bisnis yang murni tanpa koneksi.

Rakyat Rusia mengalami penderitaan setelah runtuhnya kekuasaan Uni Soviet yang berhaluan komunis, tetapi kelompok oligarki Rusia tidak merasakan penderitaan tersebut karena telah berhasil membeli aset negara dengan harga yang sangat murah, sedangkan aset tersebut menghasilkan keuntungan yang sangat besar. Bagi rakyat Rusia, kelompok oligarki yang sebagian besar memiliki keturunan Yahudi ini adalah lambang korupsi yang sangat berkuasa dan berpengaruh di Rusia.

Kelompok oligarki di Rusia saat ini tidak hanya eksis dalam bidang ekonomi tapi juga politik. Roman Arkadievich Abramovich yang lahir 24 Oktober 1966 di Saratov, Rusia, adalah seorang milyarder Rusia dan pemilik perusahaan investasi Millhouse Capital, dianggap sebagai salah seorang oligarki Rusia. Menurut majalah Forbes 2006, pada 13 Februari 2006 Abramovich memiliki kekayaan bersih sebesar US\$ 18.2 milyar dan menurut majalah Finance Rusia pada Januari 2007 kekayaannya mencapai US\$ 21 milyar. Abramovich dianggap sebagai orang terkaya yang tinggal di Inggris Raya pada tahun 2003.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> *Ibid*

<sup>12</sup> Wikipedia, "Roman Abramovich," dalam

Abramovich mendapatkan kekayaannya dengan membeli saham-saham industri-industri yang baru diprivatisasikan setelah jatuhnya komunisme dengan harga murah. Abramovich pernah menjadi pemegang saham terbesar di Sibneft, sebuah perusahaan minyak besar, dan juga pemegang saham yang penting di RusAl, produsen aluminium terbesar kedua di dunia, dan beberapa perusahaan lainnya.

Amerika Serikat adalah satu-satunya negara adikuasa yang ada di dunia setelah runtuhnya Uni Soviet. Amerika dengan sejarahnya yang begitu panjang, memiliki hereditas tersendiri bagi kehidupan politik dunia, ditambah dengan dominasi dan hegemoninya terbukti dapat memaksimalkan daya tawarnya yang begitu tinggi dalam mengatur kebijakan-kebijakan luar negerinya bagi negara lain demi kepentingannya, bahkan Amerika tidak segan-segan untuk menerapkan standar ganda demi memenuhi kepentingan nasionalnya.

Sedangkan Rusia, atau disebut Persekutuan Rusia pada masa perang dingin (1947-1991) merupakan bagian dari Uni Soviet yang kemudian menjadi negara merdeka saat Uni Soviet dibubarkan. Saat ini Rusia kemudian dianggap sebagai pengganti Uni Soviet hingga banyak orang yang salah persepsi dan tidak bisa membedakan antara Uni Soviet dan Rusia. Sedangkan Amerika Serikat adalah lawan utama Uni Soviet dimasa perang dingin tersebut. Kedua negara saling berebut "kekuasaan" dengan penyebaran masing-masing ideologi dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan. Amerika Serikat dengan Containment Policy dan Uni Soviet dengan Warm Water Policy berusaha untuk memberikan pengaruh kepada negara lainnya.

Hubungan antara Amerika Serikat dan Rusia tidak bisa disamakan dengan hubungan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Saat ini Amerika dan Rusia tergabung dalam G8. Tetapi, walaupun kedua negara tersebut sudah sedikit memiliki hubungan baik tetap ada “perang dingin” yang baru antara kedua negara. Beberapa kebijakan luar negeri yang dikeluarkan oleh Rusia cukup sering bertentangan dengan kebijakan luar negeri Amerika Serikat terutama kebijakan luar negeri masing-masing negara terhadap negara-negara di Timur Tengah. Maka, dalam kesempatan kali ini penulis akan mencoba memaparkan bagaimana sebenarnya kebijakan luar negeri kedua negara tersebut, baik kebijakan luar negeri Rusia dan Amerika terhadap negara lain maupun kebijakan luar negeri kedua negara terhadap negara.

### **C. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah apa persamaan dan perbedaan politik luar negeri Rusia pada masa pemerintahan Mikhail Gorbachev dan Boris Yeltsin?

### **D. Landasan Teori**

Teori adalah konsep-konsep yang saling berhubungan menurut aturan logika menjadi suatu bentuk pernyataan tertentu sehingga dapat menjelaskan fenomena tersebut secara ilmiah.<sup>13</sup> Untuk menjawab pertanyaan yang dikemukakan dalam rumusan masalah diatas, penulis menggunakan teori

---

<sup>13</sup> Mohtar Mas' oed, *Ilmu Hubungan Internasional : Teori Dan Metodologi*. Yogyakarta: nusat

'Perbandingan Sistem Politik', dan teori 'Kepentingan Nasional' (*National Interest*).

### 1. Perbandingan Sistem Politik

Dalam menganalisa perbandingan biasanya harus dilalui tiga tahap seperti yang ditunjukkan Profesor Almond, yaitu : (1) tahap mencari informasi tentang sistem politik yang jadi sasaran penelaahan; (2) memilah-milah informasi ini berdasar klasifikasi tertentu, seperti kelompok kepentingan atau birokrasi, dan kemudian (3) dengan menganalisa hasil pengklarifikasian itu dapat di lihat keteraturan (*regularities*) dan hubungan-hubungan di antara berbagai variabel dalam masing-masing sistem politik. Selanjutnya menjelaskan tiga konsep yang dianggapnya paling tepat untuk menganalisa berbagai sistem politik. Konsep-konsep itu adalah sistem, struktur, dan fungsi.<sup>14</sup>

Sistem diartikan sebagai suatu konsep ekologis yang menunjukkan adanya suatu organisasi yang berinteraksi dengan suatu lingkungan, yang mempengaruhinya maupun dipengaruhinya. Sistem politik merupakan organisasi melalui mana masyarakat merumuskan dan berusaha mencapai tujuan-tujuan bersama mereka. Sistem politik melaksanakan perang atau mendorong usaha perdamaian; memajukan perdagangan internasional atau membatasinya, membuka diri demi pertukaran gagasan-gagasan atau menutup diri; menarik pajak dari rakyat secara adil atau tidak adil; mengatur perilaku manusia dengan ketat atau

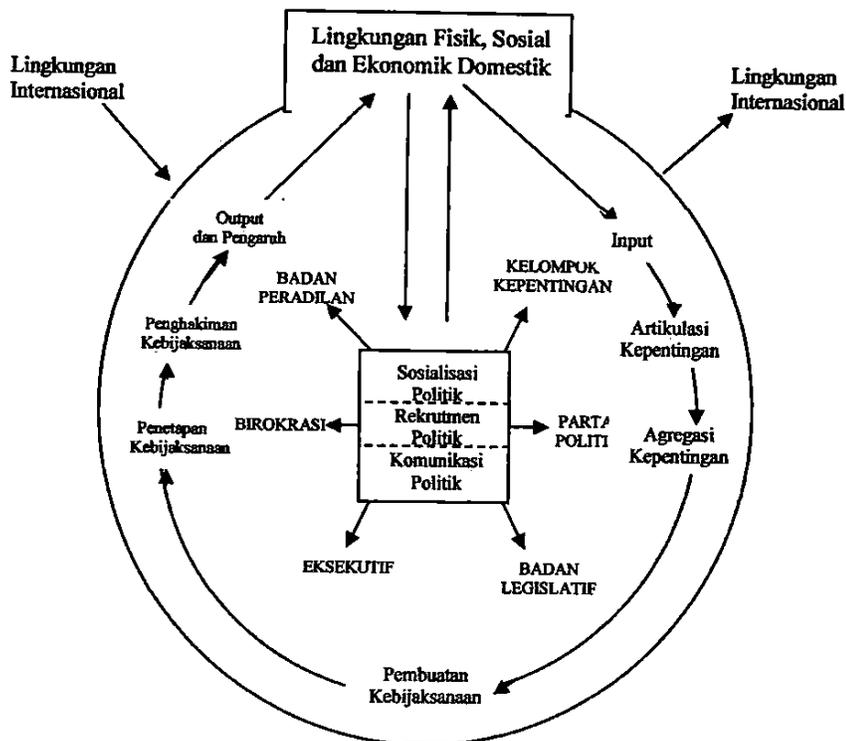
---

<sup>14</sup> Mohtar Mas'ood dan Colin MacAndrews, "Studi Perbandingan Sistem Politik" dalam Perbandingan Sistem Politik, Yogyakarta : Gadjah mada University Press, 2001, hal 21-32. Seperti yang dikutip dari Gabriel A. Almond "The ..."

kurang ketat; mengalokasikan sumber daya untuk bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan atau tidak; dan sebagainya.

Untuk melakukan berbagai kegiatan ini sistem politik mempunyai lembaga-lembaga atau struktur-struktur yang menjalankan kegiatan-kegiatan atau fungsi-fungsi tertentu, yang selanjutnya memungkinkan sistem politik itu untuk merumuskan dan melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaanya. Seperti yang ditunjukkan dalam gambar dibawah ini:

**Gambar 1**  
**Sistem Politik : Struktur an Fungsi**



Apabila kita bisa mengetahui bekerjanya keseluruhan sistem, maka barulah kita bisa memberi makna pada ciri-ciri struktur itu dan kita dapat menyatakan bahwa lembaga-lembaga tertentu menjalankan fungsi-fungsi tertentu dengan konsekuensi-konsekuensi tertentu pula. Fungsi-fungsi itu ada tiga, yaitu: fungsi sosialisasi politik, fungsi rekrutmen politik, dan fungsi komunikasi politik. Penerapan kebijaksanaan pemerintah (output) mempengaruhi kehidupan ekonomi, struktur social, dan kebudayaan dari masyarakat domestik. Pengaruh-pengaruh terhadap masyarakat ini selanjutnya mempengaruhi tuntutan-tuntutan berikutnya yang diajukan pada sistem politik, dan bisa meningkatkan maupun menurunkan tingkat kesetiaan politik dikalangan masyarakat itu.

Pada waktu masih menjadi negara komunis, Uni Soviet mempunyai dua struktur yaitu komunis dan birokrasi. Para pemimpin di Uni Soviet memerintah sebuah negara yang terisolir tanpa bersahabat dengan negara lainnya dalam satu dunia. Kepentingan domestik yang paling utama adalah masalah melambatnya pertumbuhan ekonomi dan kebutuhan untuk memperbaiki infrastruktur sistem sosial.<sup>15</sup>

Gorbachev dengan gagasan-gagasannya berusaha untuk memperbaiki perekonomian dan menerapkan demokrasi di Uni Soviet, namun mengalami kesulitan, karena masyarakatnya yang masih berhalauan komunis. Uni Soviet dengan *Warm Water Policy* berusaha untuk menguasai pelabuhan laut yang tadinya beku selama musim dingin dan berusaha untuk memberikan pengaruh kepada negara lainnya. Akibatnya Rusia mendapatkan perlawanan dari negara-

---

<sup>15</sup> Roy C. Macridis dan Bernard E. Brown, "Perubahan dalam Sistem Politik Soviet" dalam *Perbandingan Politik* (Gatot, 1981), 10-11.

negara Eropa pada tahun 1854-1856 dimana pada akhirnya Rusia gagal merebut Bosphorus dan Dardanella dari tangan Turki. Hubungan baik dengan negara lain terutama Amerika juga sulit, karena orientasi masyarakat Uni Soviet pada waktu itu masih terbawa pada keinginan untuk menjadi negara adidaya.

Sedangkan setelah Uni Soviet bubar, Yeltsin memimpin Rusia dan meneruskan pembaruan yang dilakukan Gorbachev serta melakukan reformasi dengan menjual aset-aset negara pada suatu kelompok yang dinamakan kelompok oligarkhi. Yeltsin juga mengarahkan kebijakan luar negerinya pada kerjasama dengan negara lain termasuk Amerika, dan Rusia juga tidak terlalu “keras” terhadap negara bekas Uni Soviet lainnya. Rusia menjadi negara merdeka setelah runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991. Contoh kerjasama Rusia dan Amerika, Yeltsin dan Bush bertemu di Washington untuk membicarakan tentang reduksi senjata nuklir kedua negara dibawah jumlah minimum pada perjanjian *Strategic Arms Reduction Treaty* pada tahun 1991. Tujuannya yaitu untuk mengurangi kepemilikan senjata nuklir kedua negara.

## 2. Kepentingan Nasional

Konsep kepentingan nasional adalah konsep yang populer dalam analisa hubungan internasional, baik untuk mendeskripsikan menjelaskan, meramalkan maupun menganjurkan perilaku internasional untuk menjelaskan perilaku luar negeri suatu negara. Analisis sering memakai konsep kepentingan nasional sebagai dasar untuk menjelaskan perilaku luar negeri suatu negara serta sebagai pengukur keberhasilan politik luar negeri yaitu untuk evaluasi.<sup>16</sup>

Jack C. Plano dan Roy Olton mendefinisikan kepentingan nasional sebagai:

Kepentingan nasional merupakan tujuan pokok yang paling penting yang menjadi pedoman para pembuat keputusan disuatu negara dalam membuat kebijakan politik. Negara akan mengedepankan apa yang paling penting kebutuhannya secara umum. Termasuk didalamnya hak untuk mempertahankan diri, kemerdekaan, integritas wilayah, keamanan serta kesejahteraan ekonomi.<sup>17</sup>

Prioritas kepentingan nasional setiap negara berbeda, tergantung pada kebutuhan masing-masing negara. Para ahli cenderung untuk menempatkan masalah survival atau self preservation sebagai prioritas utama serta beranggapan bahwa tujuan mendasar yang menentukan dan memandu para pembuat keputusan adalah kepentingan nasional.<sup>18</sup>

Kepentingan nasional merupakan tujuan nasional yang dijadikan dasar dan penentu utama yang menjadi pemandu para pembuat kebijakan dalam menentukan politik luar negeri atau satu negara dengan negara lain serta berbeda-beda sasaran yang hendak dituju, namun biasanya berkisar pada: (1) *self preservation*, yaitu hak untuk mempertahankan diri; (2) *Independence*, yang berarti tidak dijajah atau tunduk pada negara lain; (3) *military security*, berarti tidak ada gangguan dari kekuatan militer negara lain; (4) *territorial integrity* atau kebutuhan wilayah, dan (5) *economic well being* atau kesejahteraan ekonomi.

Mikhail Gorbachev dengan Boris Yeltsin melakukan politik luar negerinya dengan mengutamakan kepentingan nasional yang berbeda. Mikhail Gorbachev lebih mengutamakan pada *independence* atau tidak tunduk pada Negara lain,

---

sementara Boris Yeltsin menekankan pada kepentingan *economic well being* atau mengutamakan kesejahteraan ekonomi masyarakat Rusia. Demi meningkatkan perekonomian Rusia, Yeltsin bahkan menjual aset-aset negaranya untuk dimiliki oleh sekelompok orang yang diharapkan akan membantu memperbaiki perekonomian Rusia.

#### **E. Hipotesa**

Hipotesis dari penelitian ini adalah:

1. Persamaan antara Gorbachev dan Yeltsin adalah sama-sama berusaha menerapkan demokrasi, meningkatkan perekonomian masyarakatnya, berusaha memperbaiki hubungan dengan negara lain.
2. Perbedaannya antara lain:
  - a) Pada masa Uni Soviet, struktur masyarakatnya masih memegang teguh paham komunis, sehingga Gorbachev kesulitan untuk menerapkan demokrasi, melakukan restrukturisasi ekonomi dan juga bekerjasama dengan negara lain (dalam hal ini Amerika).
  - b) Pada masa Uni Soviet bubar maka partai komunis juga dibubarkan. Yeltsin yang memimpin Rusia meneruskan usaha Gorbachev untuk memperbaiki perekonomian, berusaha menerapkan demokrasi dan

## **F. Jangkauan Penelitian**

Untuk membatasi penganalisisan skripsi ini, penulis melakukan pembahasan pada masa Mikhail Gorbachev terpilih sebagai Sekretaris Jenderal Uni Soviet yaitu Maret 1985, hingga 1999 dimana masa pemerintahan Boris Yeltsin berakhir.

## **G. Tujuan Penulisan :**

Tujuan dari penulisan ini adalah :

1. Untuk membuktikan jawaban dari rumusan masalah dan membuktikan kebenaran dengan teori serta data yang relevan.
2. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan politik luar negeri Rusia pada masa pemerintahan Mikhail Gorbachev dan Boris Yeltsin.
3. Untuk melengkapi tugas akhir sebagai syarat memperoleh gelar sarjana S1 pada jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

## **H. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam proses skripsi ini adalah metode deskripsi analitik, dengan mengumpulkan data dan fakta, kemudian berdasarkan kerangka teori disusun secara sistematis sehingga dapat memperlihatkan korelasi antara fakta yang satu dengan yang lainnya. Metode ini ditunjang *library research* yang

## **I. Sistematika Penelitian**

### **BAB I. PENDAHULUAN**

Merupakan pendahuluan yang di dalamnya diuraikan mengenai: alasan pemilihan judul, latar belakang masalah, perumusan masalah, landasan teori, hipotesa, jangkauan penelitian, tujuan penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika penelitian.

### **BAB II. GAMBARAN UMUM RUSIA**

Pada bab ini akan terbagi dalam beberapa sub bab yaitu: Sejarah Berdirinya Rusia, Kondisi Rusia di Masa Uni Soviet, Pemerintahan dan Perpolitikan di Rusia, Perekonomian Rusia, Pertahanan Keamanan Rusia.

### **BAB III. MASA PEMERINTAHAN MIKHAIL GORBACHEV DAN BORIS YELTSIN**

Pada bab ini akan membahas tentang politik luar negeri Uni Soviet pada masa pemerintahan Mikhail Gorbachev meliputi: Uni Soviet, Latar Belakang Kehidupan Gorbachev, Pembaharuan yang dilakukan Gorbachev, Kerjasama yang Dilakukan dengan Negara Lain, dan Akibat-akibat dari pembaharuan Gorbachev. Selanjutnya akan dibahas politik luar negeri Rusia pada masa Boris Yeltsin meliputi: Latar Belakang Kehidupan Yeltsin, Yeltsin Meneruskan Upaya Gorbachev, Upaya Boris Yeltsin dalam Mengatasi Masalah Perekonomian Rusia, Kerja Sama yang

**BAB IV. PERSAMAAN DAN PERBEDAAN POLITIK LUAR NEGERI  
MIKHAIL GORBACHEV DAN BORIS YELTSIN**

Bab VI akan membahas tentang perbedaan dan persamaan politik luar negeri yang dilakukan oleh Gorbachev dan Yeltsin.

**BAB V. KESIMPULAN**

Dalam hal ini . . .